

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar dan menjadi perhatian serius dari pemerintah. Jumlah penduduk yang banyak dengan sebagian besar penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan memicu adanya kesenjangan sosial dan terjadi kemiskinan. Masalah kemiskinan bukan hanya merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi masalah global.

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan. (Wongdesmiwati 2009).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa

pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Tingginya persentase penduduk miskin disuatu wilayah akan berpengaruh pada rendahnya daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini karena umumnya pendapatan penduduk miskin tersebut sangat rendah sehingga dari segi pendapatan perkapita juga rendah, apalagi rata-rata jumlah anggota rumah tangga penduduk miskin umumnya lebih banyak dari rumah tangga penduduk tidak miskin sehingga rata-rata pendapatan perkapita penduduk tersebut relative lebih rendah. Keadaan ini akan lebih parah lagi jika tingkat pengangguran di wilayah tersebut juga tinggi.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Ada dua macam ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan seseorang melampaui garis kemiskinan yang ditetapkan. Sedangkan kemiskinan relatif berkaitan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lainnya.

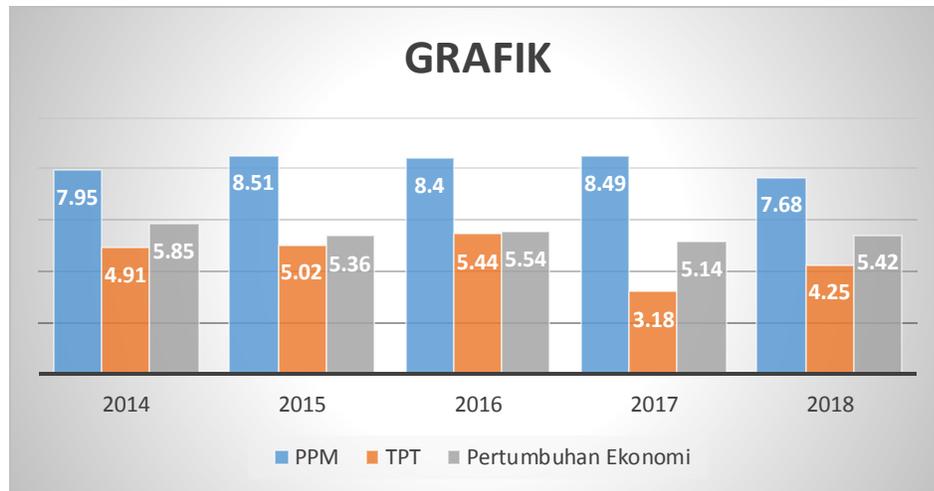
Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (World Bank, 2004). Menurut Bank Dunia salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah penangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.

Salah satu negara yang berusaha mengurangi tingkat kemiskinan adalah Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar penduduknya memiliki tingkat pendidikan rendah dan tentunya memiliki berbagai masalah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya secara merata. Kemiskinan terjadi di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia. Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang kompleks, sehingga diharapkan pemerintah dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sebagai pulau yang memiliki tingkat

kepadatan tertinggi di Indonesia, Pulau Jawa memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret tahun 2013 jumlah penduduk miskin paling banyak berkumpul di Pulau Jawa dengan total 15,3 juta orang atau 10,92% dari total penduduk Jawa. Serta dalam bulan Maret 2011 - Maret 2012 Provinsi Jawa Timur dinobatkan sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak kedua seIndonesia oleh BPS. Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar setelah Provinsi Jawa Barat yang memiliki ketimpangan terhadap jumlah penduduk miskin. Ketimpangan tersebut terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan, terutama dengan penduduk berstrata ekonomi rendah serta memiliki pendidikan yang rendah (Wulandari, 2014).

Selain itu, Kota Kediri merupakan salah satu wilayah yang perkembangan perekonomiannya pesat. Namun ditengah pesatnya perkembangan perekonomian yang terjadi, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang masih menjadi tugas rumah pemerintah Kota Kediri. Permasalahan kemiskinan masih menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian ekstra. Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya di pandang dari rendahnya kualitas ekonomi, tapi sudah di pandang dari sudut yang berbeda-beda dan tergantung pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga telah bergeser. Dalam arti yang luas kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi tidak sebatas pada belum dapat memenuhi kebutuhan dasar namun juga secara umum belum dapat

memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (Alit dan Sudiana, 2013). Grafik tentang persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri 2014-2018 disajikan pada Gambar 1.1



Sumber : BPS Kota Kediri

Selama tahun 2014-2018, jumlah penduduk miskin di Kota Kediri berkisar antara 21,90 ribu jiwa hingga 24,07 ribu jiwa. Pada tahun 2014 penduduk miskin Kota Kediri sebanyak 22,13 jiwa. Tahun 2015 penduduk miskin meningkat menjadi 23,77 jiwa. Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 23,64 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan menjadi sebanyak 24,07 jiwa. Kemudian pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kota Kediri menurun menjadi 21,90 jiwa.

Berdasarkan data dari BPS Kota Kediri bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Kediri selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Kediri pada tahun 2014 naik sebesar 4,91% pada

tahun 2015 meningkat sebesar 5,02 % selanjutnya pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka di Kota Kediri meningkat sebesar 5,44 % dan tahun 2017 menurun sebesar 3,18 % sedangkan tahun 2018 kembali naik sebesar 4,25 %. Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk bisa menekan tingkat pengangguran.

Meskipun pertumbuhan ekonomi yang dialami Kota Kediri sejak tahun 2014– 2018 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 5,46 % tetapi tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan. Rata-rata tingkat kemiskinan di Kota Kediri selama periode 2014 – 2018 merupakan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dengan rata-rata 8,21 % per tahun. Sedangkan tingkat pengangguran selama periode 2008 – 2014 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 19,40 % pertahunnya.

Memperhatikan fenomena di atas dapat diketahui bahwa kemiskinan menjadi salah satu pembicaraan yang menarik. Kemiskinan kalau dibiarkan saja akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar diantaranya adalah timbulnya kejahatan, karena orang yang berada dalam kemiskinan tidak dapat melaksanakan berbagai kehidupan sosialnya dengan baik, tidak memperoleh pendidikan yang baik, akses kesehatan yang berkualitas, melaksanakan kewajiban agama secara maksimal dan merasakan hidup layak. Karena itu penting untuk diketahui apa saja faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan, agar dapat dipergunakan sebagai perencanaan pembangunan sehingga pembangunan lebih terarah pada pengentasan kemiskinan (Ayu dan Otok, 2014).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin di Kota Kediri?
2. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin di Kota Kediri?
3. Apakah rata rata lama sekolah berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin di Kota Kediri?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin di Kota Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap persentase penduduk miskin di Kota Kediri?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap persentase penduduk miskin di Kota Kediri?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh rata rata lama sekolah terhadap persentase penduduk miskin di Kota Kediri?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap persentase

penduduk miskin di Kota Kediri?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum, sebagai alat untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan serta badan studi komperatif penelitian lain yang berkitan dengan kemiskinan di Kota Kediri
2. Bagi Universitas, dapat menambah acuan akademis dan koleksi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa timur dan perpustakaan pusat UPN “Veteran” Jawa Timur dalam membahas ataupun memecahkan permasalahan yang sama
3. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik dan sekaligus melatih diri untuk memecahkan masalah